

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BATU
(Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu)**

Lailatul Chasanah¹, Slamet Muchsin², Khoiron³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl.
MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: lailacha06@gmail.com*

ABSTRAK

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk daerahnya agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta peran dari masyarakat itu sendiri. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengelola sumber potensi daerah nya serta meningkatkan daya saing dengan memerhatikan keadilan, pemerataan, prinsip demokrasi, serta keanekaragaman. Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi. Di Kota Batu membutuhkan banyak lahan parkir yang harus disediakan namun minimnya lahan parkir yang mengakibatkan para pengendara menaruh kendaraannya sembarangan dan dimanfaatkan oleh juru parkir untuk menarik keuntungan, meski peraturan pemerintah tentang parkir dan pajak pembayaran buat parkir telah ditetapkan, namun masih saja juru parkir mengambil keuntungan sendiri dengan menaikkan pembayaran tarif parkir, Seperti yang terjadi banyak penarikan uang parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang tertera dikarcis, contohnya di alun-alun kota Batu. Dalam karcis tertera Rp 2000 kemudian dibawahnya tertera tulisan sesuai perda nomor 10 tahun 2010. Dengan tidak sesuai nya tarif parkir ini menjadikan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada sektor retribusi parkir tidak dapat tercapai. Faktor-faktor yang menghambat diantaranya sumber daya manusia seharusnya profesional, isi kebijakan belum dipahami oleh implementor kebijakan dan pelaksana lainnya, serta pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Dan faktor-faktor yang mendukung ini seharusnya didukung oleh ada insentif pengelola parkir, fasilitas yang memadai serta partisipasi masyarakat yang sangat penting juga dalam impelentasi kebijakan peraturan ini.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, retribusi parkir

Pendahuluan

Pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri atas beberapa provinsi dan terbagi menjadi beberapa kabupaten atau kota. Otonomi daerah merupakan pemindahan sebagian besar kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah otonom, sehingga apa yang di tuntut atau permasalahan yang terjadi di masyarakat daerah, pemerintah daerah otonom dapat merespon dengan cepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah otonom tersebut.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengelola sumber potensi daerah nya serta meningkatkan daya saing dengan memerhatikan keadilan, pemerataan, prinsip demokrasi, serta keanekaragaman.

Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi. di kota batu membutuhkan banyak lahan parkir yang harus disediakan namun minimnya lahan parkir yang mengakibatkan para pengendara menaruh kendaraannya sembarangan dan dimanfaatkan

oleh juru parkir untuk menarik keuntungan, meski peraturan pemerintah tentang parkir dan pajak pembayaran buat parkir telah ditetapkan, namun masih saja juru parkir mengambil keuntungan sendiri dengan menaikan pembayaran tarif parkir, bukan hanya di pinggiran jalan di tempat berlibur, pusat perbelanjaan, bahkan di ATM pun dimanfaatkan juru parkir untuk mengambil keuntungan mereka.

Persoalannya ialah, apakah penghasilan parkir itu diserahkan ke pemerintah atau bagi hasil dan atau hanya untuk mereka sendiri ? Dengan masalah yang ada sampai saat ini pemerintah belum ikut andil dalam masalah ini, padahal masalah ini sangat merugikan masyarakat.

Seperti yang terjadi banyak penarikan uang parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang tertera dikarcis, contohnya di alun-alun kota Batu. Dalam karcis tertera Rp 2000 kemudian dibawahnya tertera tulisan sesuai perda nomor 10 tahun 2010.

Berkaitan dengan persoalan penarikan retribusi parkir yang bertentangan dengan undang-undang sepertinya menjadi kebiasaan yang berlangsung terus menerus. Mengenai persoalan ini, tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah. Sementara itu, dari sisi masyarakat seperti tidak memperdulikan persoalan ini. Aturan yang pemerintah tetapkan tentang retribusi tempat khusus parkir dirasa belum cukup untuk menjadikan pengelola jasa parkir sadar untuk menerapkan aturan tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Fokus penelitian

Dengan fokus penelitian seperti ini tidak akan terjebak dengan volume data yang melimpah dilapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

- 1) Mengetahui pembagian hasil parkir antara juru parkir dan pemerintah
- 2) Penggunaan karcis yang legal dari Dinas Perhubungan
- 3) Penyetoran hasil parkir

- 4) Pengawasan pemerintah terhadap parkir dan sanksi terhadap pelanggaran

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini dilaksanakan Alun-Alun Kota Batu. Sedangkan situs penelitiannya yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Batu.

Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan tangan pertama oleh ahli analisis .(Robert. 1984:361) Serta data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi, data tersebut meliputi: Kepala bidang Dinas Perhubungan Kota Batu, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batu, Juru parkir di kawasan kota Batu, masyarakat yang menggunakan lahan parkir di kawasan Kota Batu.

2. Data sekunder

Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telaah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini startegi untuk memperoleh keterangan penting dengan teknik:

- 1.wawancara,
2. Pengamatan,
3. Dokumentasi

Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan.

Pembahasan

Implementasi kebijakan peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Kota Batu dalam menunjang PAD Kota Batu

a. Pembagian hasil parkir

Pembagian hasil parkir harus saling menguntungkan kedua belah pihak, dan juga yang berdasarkan dengan Peraturan yang telah ditetapkan. semua juru parkir menyetorkan sebagian hasilnya kepada bendahara Dinas

Perhubungan sesuai dengan target yang ditentukan.

Setiap juru parkir memiliki target yang berbeda-beda sehingga memengaruhi jumlah hasil setoran retribusi parkir yang berbeda, namun dalam pembagian hasil retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak juru parkir dan Dinas Perhubungan harus sama nilainya yaitu 60% untuk Kas Daerah dan 40% untuk juru parkir.

Konsistensi pada implementasi peraturan daerah kota batu nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi parkir harusnya berjalan sesuai dengan rencana dan sistematis, pola koordinasi dalam pelaksanaan juga harus jelas.

b. Penggunaan karcis legal

Legal yaitu sesuai dengan perundang-undangan atau hukum. Karcis yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan berupa karcis yang legal, ialah memiliki perforasi (pembulatan lubang pada kertas) dan ada nomor serinya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Batu pada tahun 2014 sebesar 0,51 %, tahun 2016 sebesar 0,36% sedangkan tahun 2018 retribusi parkir memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 0,21%. Dengan kata lain penerimaan retribusi parkir pada 5 (lima) tahun terakhir yakni 2014 s/d 2018 memberikan kontribusi kurang dari angka 1% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Hal ini apa bila di hitung berdasarkan ukuran yang dikemukakan oleh Munir H. Dasril di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap PAD di Kota Batu.

Oleh karena itu dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan, pemerintah daerah Kota Batu khususnya Dinas Perhubungan Kota Batu selaku implementator kebijakan retribusi perparkiran dituntut untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir terutama dalam melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap petugas pemungutan di lapangan agar bekerja secara jujur efektif terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (pengguna jasa parkir), serta perlunya pengadaan karcis (kupon) parkir yang cukup bagi para juru parkir.

Jika penggunaan karcis dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan daerah, maka dengan demikian kebocoran retribusi parkir di lapangan akan di tekan seminimal mungkin sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah khususnya di sektor retribusi parkir.

c. Penyetoran hasil parkir

Adapun retribusi parkir dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dimaksud adalah berupa karcis atau kupon parkir (dalam karcis parkir tertera Jenis Kendaraan, Nomor Polisi, Tanggal dll).

Sebelum disetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah, alur pertama yaitu melalui beberapa juru parkir yang hasil parkirnya dikumpulkan kepada juragannya atau koordinator juru parkir, yang selanjutnya koordinator tersebut menyetorkannya kepada bendahara Dinas Perhubungan yang berada di gedung dari Dinas Perhubungan itu sendiri, kemudian pada hari itu juga uang disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Mardiasmo (2003:30) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat

Dapat disimpulkan jika dalam melakukan penyetoran sudah sesuai dengan peraturan dan berdasarkan alur yang dimulai dari juru parkir hingga masuk ke kas daerah, disertai transparansi dengan semua pihak termasuk masyarakat agar tidak akan menimbulkan kecurigaan ataupun hal yang tidak diinginkan lainnya.

d. Pengawasan

Pengawasan ini merupakan usaha dalam menjamin bahwa tindakan operasional yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan peraturan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dishub ini meninjau apakah para juru pungut sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, misalnya tidak boleh memungut retribusi melebihi tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, harus memberikan karcis (kupon) parkir kepada para pengguna jasa parkir dan sebagainya.

Pengawasan secara tidak langsung juga dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis Sedangkan kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai

sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

Bahwa jika sistem pengawasan (*controlling*) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu selaku implementator kebijakan retribusi parkir terhadap para pemungut retribusi (juru parkir) dilakukan secara optimal, maka akan mengurangi kecurangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ditinjau dari beberapa hal berikut:
 - a) Pembagian hasil parkir
 - b) Penggunaan karcis yang legal
 - c) Penyetoran hasil retribusi parkir
 - d) Pengawasan dari Dinas Perhubungan
2. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di kota batu antara lain:
 - a) Faktor pendukung :
 - i) insentif,
 - ii) Fasilitas
 - iii) Partisipasi Masyarakat
 - b) Faktor penghambat :
 - i) sumber daya
 - ii) isi kebijakan
 - iii) Rendahnya pengawasan

Saran

1. Pemerintah Kota Batu perlu meningkatkan sosialisasi baik dengan masyarakat sebagai (pengguna parkir) maupun para juru parkir terkait implementasi kebijakan retribusi parkir, sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya penerimaan retribusi parkir dalam memberikan kontribusi terhadap PAD dan pembangunan.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, dibutuhkan suatu sistem pengawasan (*controlling*) yang baik antar instansi terkait (implementator) dengan para juru parkir (jukir) agar mereka bekerja secara efektif dan bertanggungjawab, dengan demikian kecenderungan akan

kemungkinan timbulnya kebocoran-kebocoran dalam pemungutan retribusi parkir akan dapat ditekan seminimal mungkin.

3. Pemerintah kota batu dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi parkir ini diharapkan dapat dikaji ulang terkait isi kebijakan serta adanya peraturan jelas dan terinci agar dalam implementor dapat berjalan sesuai peraturan tersebut.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Agustino, Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Atmosudirjo Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Denzin, N.K dan Lincoln, Y.S (2009), *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadari Nawawi, H. Murni Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajamada University Press, cet, 2, 1996)
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Kaloh. 2007. *Kepemimpinan Kepala daerah pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Luankali, Bernandus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan keputusan*. Jakarta: Amelia Press
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

- Munir, dasril. Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. 2004. Kebijakan dan manajemen keuangan daerah, Yogyakarta:YPAP
- Nugroho, Riant. 2012. *Keamanan Nasional sebagai Kebijakan Publik*. Jakarta: Setneg RI.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru.
- Pasolong, H. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, 1984 *Rencana Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Siagian, Sondang P, 2002, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugandi, Y. S. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharno. 2010. *Dasar-dasar kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. UNY Press:Yogyakarta
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Soebechi, Imam. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sondang P. Siagian, 2005, *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Lukman Offset
- Taufiqurakhman, 2014. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Universitas Moetopo Beragama (Pers)
- Thoha, M. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo. 2010. *Analisi Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasi kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Peraturan-peraturan :**
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
- Sumber Skripsi:**
- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113.
- Sumber Artikel:**
- Gunawan Witjaksana, Pentingnya Menjaga Amanah Artikel, *Harian Pagi Wawasan*, 26 April 2011
- Sumber Internet :**
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir> diakses pada hari kamis, 3 oktober 2019 pukul 14.15 WIB
- Winbie wimpie, *Jenis dan sumber-sumber data*, 26 maret 2013
- Batu Kotaku: Visi Misi Kota Batu. Fanny8cblog.blogspot.com. Diakses tgl 10-1-2020
- dispendajustanother.wordpress.com
- Anindia diakses 11-12-11